

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Republik Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.

Buku:

- Ali Zainudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Satu, Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. 1 Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Christine Cst Kansil, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- F.Lamintang P.A., 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah Andi dan Rahayu Siti, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, ed. I. Cet. 1 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Istanto F Sugeng, 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda.
- Kelsen Hans, 1961. *General Theory of Law and State*, translated by Andreas Wedberg, New York: Russel and Russel.
- Manan Bagir, 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo Sudikni, 1995. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. 2 Yogyakarta: Liberty.
- M. Friedman Lawrence, 2004. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (The Legal System A Social Science Perspective), cet. 1. Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin H, 2007. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Purbacaraka Purnadi dan Halim A. Ridwan, 1997. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. 6 Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Priyatno Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. 1 Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- _____, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.

- Rato Dominikus, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rasjidi Lili, 1982. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soeprapto Maria Farida Indrati, 2010. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto Seorjono dan Abdullah Mustafa, 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrani Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Waluyo Bambang, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2007. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. 1 Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- _____, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

- Agustina Shinta, *Perspsi Aparat Penegak Hukum tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam system peradilan pidana*, Padang, LPPM-Unand, 2010.
- AR Suhariyono, “*Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*” Jakarta: Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).

Sumber Lain:

- Muhammad Apyadi, “Tujuan Hukum (Berdasarkan pendapat Ahli/Doktrin)”, dalam <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/tujuan-hukum-berdasarkan-pendapat-ahli-doktrin/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Andalas, <http://www.neliti.com/publications/179264/implementasi-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-dalam-sistem-peradilan-pid>, diakses pada tanggal 16 April 2020.
- Institute For Criminal Justice Reform, “Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksesif di Aceh”, dalam [http://icjr.or.id/setahun - qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/](http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/) diakses pada tanggal 16 April 2020.
- Beritagar Mewarat Indonesia, “Dalam sebulan, 34 pelanggar syariat Islam dicambuk di Banda Aceh”, dalam <http://beritagar.id/artikel/berita/dalam-sebulan-34-pelanggar-syariat-islam-dicambuk-di-banda-aceh>, diakses pada tanggal 13 April 2020.
- BBC News Indonesia, “Qanun Aceh di anggap diskriminatif, kalau rakyat kecil membuat kesalahan langsung di bawa jalur hukum”, dalam <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-50818812> diakses pada tanggal 16 April 2020.